

► HARI BURUH

Pengusaha Tegaskan Upah Sudah Disesuaikan dengan Produktivitas



Antara/Bayu Pratama S

Buruh dari sejumlah elemen mengikuti aksi May Day Fiesta 2024 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Rabu (1/5). Dalam aksi tersebut buruh membawa dua tuntutan, yaitu menolak Omnibus law UU Cipta Kerja dan *outsourcing* dengan upah murah.

JAKARTA—Kalangan pengusaha merespons tuntutan para buruh di Hari Buruh 1 Mei 2024, agar Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Chandra Wahjudi memandang Omnibus Law UU Cipta Kerja telah dibuat melalui proses panjang. Dalam penyusunan beleid tersebut telah melibatkan tripartit yang mencakup pihak pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Pembahasannya pun turut melibatkan legislator DPR. “Jadi kami meminta semua pihak agar menghormati dan mematuhi aturan yang sudah disahkan bersama ini,” kata Chandra, Rabu (1/5).

Adapun, ihwal tuntutan buruh menghapus sistem upah murah, Chandra mengatakan

bahwa pembayaran upah pekerja oleh pengusaha dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas yang tercapai.

Menurutnya, mayoritas pengusaha enggan mengambil risiko saat membayar upah pekerja di atas produktivitas yang dihasilkan. Musababnya, pembayaran upah yang tidak sesuai dengan produktivitas dapat menurunkan daya saing hingga risiko terburuk melakukan efisiensi atau bahkan gulung tikar.

“Kebanyakan pengusaha tidak takut membayar mahal tetapi takut dan tidak bersedia membayar kemahalan. Di era persaingan global yang sangat ketat ini salah satuuntutannya adalah produktivitas yang tinggi agar mampu bersaing dan bertahan,” kata dia.

Diketahui, Konfederasi

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demo buruh pada May Day 2024 pada Rabu. Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan penghapusan upah murah.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan setidaknya ada dua tuntutan utama yang diserukan buruh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia, yakni pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (Hostum).

“Sebanyak 200.000 orang lebih mengikuti May Day se-Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Mimika, dan lain sebagainya,” kata Said, Rabu (30/4). (JIBI/Bisnis.com/ Dwi Rachmawati)

► WARUNG KELONTONG

Pemerintah Izinkan Toko Madura Buka 24 Jam

JAKARTA—Pemerintah memastikan tidak ada larangan bagi warung kelontong yang biasa disebut dengan Warung Madura untuk beroperasi 24 jam.

Dwi Rachmawati
redaksi@jibinews.co

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki untuk merespons kabar viral adanya pembatasan operasional warung Madura di wilayah Bali.

► **Kemenkop-UKM bakal mendorong pemda untuk lebih mengatur jam operasional bagi ritel modern di daerah.**

► **PP No.7/2021 menjadi komitmen pemerintah untuk melindungi warung rakyat dan UMKM dari ekspansi ritel modern.**

Menurut Teten, pihaknya telah meninjau Perda Kabupaten Klungkung No.18/2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi ritel modern, minimarket, *departement store* serta supermarket dengan batasan jam operasional tertentu,” kata Teten, Rabu (1/5).

Teten menegaskan, pihaknya justru mendukung jam operasional warung kelontong yang fleksibel

dan menyediakan kebutuhan masyarakat dengan produk lokal buatan UMKM.

Dia pun berjanji bakal mengevaluasi kebijakan daerah yang kontradiktif dengan kepentingan UMKM berkembang.

Sebaliknya, Kemenkop-UKM bakal mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengatur jam operasional dan lokal usaha bagi ritel modern di daerah. Dengan begitu, kata Teten, penataan ritel modern akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat bagi pelaku UMKM.

Adapun PP No.7/2021, kata

Teten, menjadi komitmen pihaknya untuk melindungi warung rakyat dan UMKM dari ekspansi ritel modern. Di antaranya seperti 30% ruang berjualan pada infrastruktur publik dikhususkan untuk UMKM, dengan harga sewa sekurang-kurangnya 30% lebih murah dari harga pasar yang berlaku.

Teten pun mengatakan bakal bebenah ihwal pernyataan pejabat Kemenkop UKM terkait dengan operasional warung Madura yang sebelumnya membuat gaduh di media sosial. Dia memastikan pihaknya akan terus memihak

kepada pelaku UMKM termasuk warung Madura.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengaku akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

“Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran pemda untuk mendukung UMKM,” kata Arif. (JIBI/Bisnis.com)

► BEA CUKAI

Aturan Impor Resmi Direvisi

JAKARTA—Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan impor.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan menyampaikan aturan terbaru mengenai kebijakan dan pengaturan impor tersebut tercantum dalam Permendag No.7/2024.

Dengan diberlakukannya Permendag itu, maka ada sejumlah perubahan, di antaranya, pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini tak lagi diatur dalam Permendag No.36/2024, melainkan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terhadap barang kiriman PMI, kata dia, diberikan

pembebasan bea masuk dengan nilai pabean US\$500 setiap pengiriman, paling banyak tiga kali pengiriman per tahun atau US\$1.500 untuk PMI yang tercabut.

Meski begitu, Zulhas menyebut barang kiriman PMI akan dikenakan bea masuk sebesar 7% jika terdapat kelebihan dari nilai barang dimaksud. “US\$1.500 kayak apa saja [jenis barangnya]? Itu urusan Bea Cukai, bukan di Permendag,” ujar Zulhas, Selasa (30/4).

Melalui beleid itu pula, pemerintah menghapus pembatasan jumlah barang bawaan penumpang di pesawat untuk beberapa komoditas. Tetapi pembatasan tetap berlaku untuk perangkat elektronik seperti ponsel dan komputer.

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang bawaan

penumpang di antaranya alas kaki sebanyak 2 pasang per penumpang, tas 2 pcs per penumpang, hingga barang tekstil jadi lainnya 5 pcs per penumpang.

Melalui Permendag No.7/2024, Zulhas berharap tidak ada lagi hambatan dalam melaksanakan impor barang kiriman PMI maupun impor bahan baku industri.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santosso mengaku resmi mengeluarkan sejumlah komoditas dari aturan laras. Misalnya, premiks fortifikan untuk tambahan tepung terigu resmi dikeluarkan dari aturan laras. “Ada beberapa laras yang dikembalikan ke Permendag No. 25/2022. Contoh sederhana ya terigu itulah, lainnya saya enggak hafal,” kata Budi. (JIBI/Bisnis.com/Ni Luh Anggela)

LEISURE

► PROMO HOTEL

Menginap Sekaligus Bersantap Enak di Atrium Hotel

Pasca-Lebaran, Anda tak perlu susah mencari hotel dengan layanan promo kamar yang istimewa. Pada bulan ini, The Atrium Hotel and Resort menawarkan promo fantastis yaitu promo kamar dan promo *food & beverage* yang bertajuk *May Delight* dan *Super Hemat*.

Public Relation Manager The Atrium Hotel and Resort, Restu Ema Nuraini menjelaskan sesuai tajuknya, promo kamar *May Delight* berlaku selama Mei 2024. “Cukup membayar Rp678.000 per *room* per malam dengan fasilitas kamar Deluxe, sudah termasuk diskon 20 persen *order room service* dengan minimal pembelian Rp200.000, diskon 10 persen spa, breakfast untuk dua *pxx*, *free* berenang dan *free access ke gym center*,” ucap dia dikutip dari siaran resminya, Rabu (1/5).



Istimewa

Menu yang disiapkan The Atrium Hotel and Resort dalam promo F&B *Super Hemat*.

Selama menginap, kata Restu, Anda juga bisa menikmati promo *food & beverage* (F&B) *Super Hemat*, yaitu menu chicken Gordon Bleu dan Lychee Tea dengan harga Rp110.000. Selain itu ada juga Red Velvet Cake dan Virgin Pinacolada dengan harga Rp70.000

“Jadi di mana lagi bisa bersantai menginap dan menikmati waktu sambil merasakan lezatan makanan enak ala hotel bintang empat. Ya di The Atrium Hotel and Resort saja yang berlokasi di Jl. Kebon Agung No. 20 Sendangadi, Mlati, Sleman.” (Arief Junianto/*)

Setahun Berjalan, Program Saka Wirausaha Dievaluasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) DIY menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Saka Wirausaha 2024, Selasa (30/4). Rakor itu digelar guna menggali perkembangan program yang sudah berjalan selama setahun terakhir.

Saka wirausaha merupakan program baru yang berupa penggabungan nilai-nilai pramuka untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha sejak dini.

Program ini mulai dijalankan sejak 2023 lalu. Selama setahun diterapkan, evaluasi pun dilakukan lewat rakor tersebut untuk melihat sejauh mana perkembangan program dan kegiatan maupun jumlah anggota di setiap kabupaten/kota.

Dengan begitu, nantinya bisa dirumuskan program lanjutan untuk jangka pendek dan menengah ke depannya.

Kepala Dinkop UKM DIY, Srie Nurkatsiwi mengatakan selama kurang lebih setahun berjalan tentu ada dinamika yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi program ini.

Lewat rakor tersebut, kata dia, pihaknya ingin memastikan pembentukan saka wirausaha di tingkat kabupaten/kota tidak hanya selesai ketika dilantik. Tetapi juga ikut serta menggerakkan dan membentuk ekosistem kewirausahaan.

“Kami evaluasi semua, tugasnya bagaimana atau anggotanya berapa. Karena dalam saka itu kan tempat menggembeng dan pembinaan dari beberapa aspek serta pramuka yang dijadikan semangat kepeduan,” katanya, Selasa (30/4).

Menurut Siwi, untuk tahap awal selain membentuk pengurus di tingkat cabang atau kabupaten kota pihaknya juga ingin memastikan agar mindset anggota yang tergabung dalam saka wirausaha bisa dibangun dengan optimal. Sebab dengan menyasar para pelajar, program ini harusnya bisa memastikan apa manfaat yang akan diperoleh murid ketika bergabung ke program itu.

“Program ini kan perdana di Jogja dan target kami bisa dibawa ke nasional. Makanya menuju itu tentu sudah ada standarnya dulu dan sebagai pionir



Harian Jogja

Suasana saat dilgalarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Saka Wirausaha 2024, Selasa (30/4).

kami harus mulai menumbuhkan dan membawa anak muda jadi wirausaha yang andal,” ujarnya.

Siwi juga menyinggung soal isu ekstrakurikuler pramuka yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan lantaran tidak lagi menjadi kewajiban bagi murid.



Menurutnya ada sisi positif dan negatif ekstrakurikuler pramuka tidak lagi menjadi program wajib di sekolah terhadap program saka wirausaha. Ke depannya tentu anggota yang masuk ke program ini adalah mereka yang benar-benar andal.

“Tinggal target saja bagaimana pelaksanaan ke depan. Karena di tingkat kabupaten kota kami melihat masih ada perbedaan persepsi. Maka seharusnya bisa sesuai dengan silabus dan pedoman yang sudah disusun,” kata Siwi.

Segmen Program

Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM Dinkop UKM DIY Wisnu Hermawan menyebut, pada tahun ini ada dua segmen program yang akan dijalankan pihaknya dalam kebijakan saka wirausaha itu.

Pertama, soal pengembangan cabang di tingkat kabupaten kota dan juga pengembangan di level daerah atau provinsi.

“Kami akan coba mengaktivasi pangkalan saka wirausaha di lima kabupaten kota dan menggencarkan sosialisasi serta rekrutmen, orientasi dan pelatihan,” kata Wisnu.

Pihaknya menargetkan pada April 2024 sudah ada pangkalan saka wirausaha yang berjalan dan melakukan sejumlah kegiatan di level cabang.

Insentif terhadap pembentukan pangkalan saka wirausaha itu akan diberikan guna merangsang keikutsertaan anggota untuk bergabung dan berkembang lebih luas lagi.

“Untuk tahap awal semua pangkalan saka wirausaha SMP dan sudah terbentuk kecuali Bantul dan akan kami dorong terus. Di Kota Jogja juga sudah jalan pelatihannya tinggal menunggu kabupaten lain, untuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis juga sudah siap semuanya.”

Wakil Ketua Kwarda Pramuka DIY, Edy Hari Suasana menyatakan upaya memperluas keanggotaan saka wirausaha di tingkat SMP dan SMA bisa dilakukan dengan mengajak murid yang benar-benar tertarik dalam dunia wirausaha dan memberikan mereka pelatihan dan modal.

Program ini pernah dijalankan di Kota Jogja periode 2012-2016 lalu saat SMK dan SMA masih bernama di kabupaten/kota. “Kami ingin ini dilanjutkan kembali. Bisa dikembangkan di DIY dengan pelaporan yang rinci setiap kami bisa diberikan modal usaha dan diawasi perkembangannya sampai bisa mandiri,” ucap Edy. (ADV)